



RENJA PERUBAHAN

Tahun 2025

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



Pemerintah Kota Pekalongan
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jl. Sriwijaya No 40 Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
Email. dinsosp2kb@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinsosP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disusun tanpa ada halangan sesuatu apapun.

Perubahan Renja DinsosP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 4 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, Bab III membahas Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab IV penutup.

Kami menyadari Perubahan Renja DinsosP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 ini belum sempurna, sehingga masukan, saran dan koreksi semua pihak akan menjadi lebih baik untuk penyusunan renja pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya Perubahan Renja DinsosP2KB Tahun 2025 ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Gambaran Pelayanan	1
1.2 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Analisis Tingkat Kinerja.....	1
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	8
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan.....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	24
BAB IV PENUTUP.....	34
4.1 Catatan Penting	34
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	34
4.3 Rencana Tindak Lanjut	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Renja smpai dengan Triwulan II Tahun 2025	9
Tabel 2. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat daerah Perubahan Renja 2025.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Gambaran Pelayanan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja). Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada urusan Sosial, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

1.2 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, DINSOSP2KB Kota Pekalongan mendukung pencapaian visi *“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”* dengan misi pertama *“Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat”* dan misi ketujuh *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government”*

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota

Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Permasalahan dan Hambatan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya manusia di DINSOSP2KB Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya target pencapaian sasaran dan tujuan indikator belumlah ideal. Pengalaman penanganan kemiskinan, kebencanaan dan *stunting* yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DINSOSP2KB Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan

mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik DINSOSP2KB Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026, kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government*"

Tantangan dan Peluang

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

A. Urusan Sosial

- 1) Belum optimalnya system pelayanan publik
- 2) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
- 3) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
- 4) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
- 5) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.
- 6) Belum optimalnya kinerja LKS yang ada di Kota Pekalongan

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
- 2) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.
- 3) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.
- 4) Cara kerja / sistem komando yg kurang sinkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.
- 5) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

C. Peluang

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

- 1) Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;
- 2) Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- 3) Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- 4) Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- 5) Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PPKS,
- 6) Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- 7) Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
- 8) Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
- 9) Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
- 10) Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
- 2) Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
- 3) Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;
- 4) Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 5) Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 6) Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- 7) Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
- 8) Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
- 9) Peningkatan graduasi KPM PKH;
- 10) Optimalisasi database kemiskinan;
- 11) Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
- 12) Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;
- 13) Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
- 14) Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
- 15) Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
- 16) Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran pada Kementerian Sosial 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
- b) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional;
- c) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN

Sasaran strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran strategis pada Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

- a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024;
- b) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
- c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;
- d) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024;
- e) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024;
- f) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana.

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS)

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa Isu yang muncul di Kota pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan rencanan strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2025 memuat 9 (sembilan) program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 52 subkegiatan dengan anggaran senilai Rp. 11.415.833.000,- . Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan, subkegiatan yang mengalami dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.238.997.000,-

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan renja 2025 DinsosP2KB Kota Pekalongan telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I. Berbagai kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja DinsosP2KB Tahun 2025 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan renstra DinsosP2KB serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja dan renstra sampai dengan triwulan I Tahun 2025 akan dijabarkan dalam tabel lebih lanjut.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada DinsosP2KB Kota pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	29.45 persen	29.45 %	3.755.039.000	857.708.205	22,84%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	24.82 persen	24.82 %			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	8.89 persen	8.89 %			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.78 persen	17.78 persen	26.640.000	1.000.000	3,75%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	0 dokumen	0 %	8.500.000	0	0,00%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0 %	5.720.000	0	0,00%
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	4 dokumen	26.67 %	12.420.000	1.000.000	8,05%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	66.67 persen	66.67 persen	2.610.150.000	656.395.691	25,15%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	19 orang/bulan	95 %	2.567.467.000	647.170.691	25,21%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	3 dokumen	25 %	39.300.000	9.225.000	23,47%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	SKPD							
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100 %	3.383.000	0	0,00%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	0 persen	0 persen	5.000.000	0	0,00%
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	0 paket	0 persen	5.000.000	0	0,00%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	59.05 persen	59.05 persen	291.258.000	45.953.100	15,78%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	25 %	7.300.000	0	0,00%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	3 paket	75 %	91.050.000	21.022.600	23,09%
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 %	4.110.000	990.500	24,10%
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	50 %	82.318.000	12.858.000	15,62%
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2 paket	50 %	5.480.000	3.170.000	57,85%
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3 dokumen	150 %	1.000.000	180.000	30,00%
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	150 laporan	18 laporan	12 %	100.000.000	7.732.000	7,73%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	27.78 persen	27.78 %	365.321.000	77.469.341	21,21%
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1 laporan	25 %	1.760.000	0	0,00%
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	4 laporan	33.33 persen	177.561.000	32.990.714	18,58%
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	3 laporan	25 %	186.000.000	44.478.627	23,91%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	22.92 persen	22.92 %	456.670.000	76.890.073	16,84%
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 unit	5 unit	7.24 %	225.920.000	51.481.073	22,79%
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	3 unit	37.50 %	202.500.000	16.829.000	8,31%
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	15 unit	23.81 %	28.250.000	8.580.000	30,37%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	0 persen	0 %	390.512.000	69.243.222	17,73%
7.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	0 persen	0 %	182.140.000	44.193.376	24,26%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
7.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	0 keluarga	0 %	182.140.000	44.193.376	24,26%
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	0 persen	0 %	208.372.000	25.049.846	12,02%
8.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	0 orang	0 %	41.480.000	0	0,00%
8.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	4 orang	100 %	104.952.000	25.049.846	23,87%
8.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	0 lembaga	0 %	61.940.000	0	0,00%
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	100 persen	100 persen	1.760.492.000	249.558.338	14,18%
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	107.87 persen	107.87 %	1.189.082.000	239.096.106	20,11%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	Pengemis di Luar Panti Sosial							
9.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	135 orang	158.82 %	457.932.000	80.634.196	17,61%
9.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	135 orang	158.82 %	669.780.000	151.665.260	22,64%
9.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	135 orang	158.82 %	61.370.000	6.796.650	11,07%
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.82 persen	0 persen	0 %	571.410.000	10.462.232	1,83%
10.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	903 orang	0 orang	0 %	428.560.000	0	0,00%
10.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0 orang	0 %	23.540.000	0	0,00%
10.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan	15 orang	15 orang	100 %	16.010.000	0	0,00%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota						
10.4	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0 orang	0 %	50.550.000	0	0,00%
10.5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	44 orang	53.01	52.750.000	10.462.232	19,83%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53.73 persen	78.79 persen	146.64 %	1.492.520.000	343.192.269	22,99%
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	0 persen	0 %	1.492.520.000	343.192.269	22,99%
11.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	0 orang	0 %	627.110.000	38.493.144	6,14%
11.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	500 orang	52.63 %	865.410.000	304.699.125	35,21%
V	PROGRAM PENANGANAN	Persentase korban bencana pada saat dan	100 persen	100 persen	100 persen	345.250.000	124.230.031	35,98%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	BENCANA	setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)						
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	51.43 persen	51.43 persen	345.250.000	124.230.031	35,98%
12.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	480 orang	24 %	300.000.000	124.230.031	41,41%
12.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	9 orang	0.45 %	27.000.000	0	0,00%
12.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	480 orang	24 %	18.250.000	0	0,00%
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	100 persen	100 %	102.910.000	12.993.298	12,63%
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	25 persen	25 persen	102.910.000	12.993.298	12,63%
13.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	1 makam	100 persen	102.910.000	12.993.298	12,63%
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	0 persen	0 %	205.380.000	58.021.632	28,25%
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan	100 persen	0 persen	0 %	205.380.000	58.021.632	28,25%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
		Pembangunan Keluarga)						
14.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	0 dokumen	0 %	54.480.000	11.803.232	21,67%
14.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	0 laporan	0 %	122.100.000	43.500.000	35,63%
14.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	0 dokumen	0 %	28.800.000	2.718.400	9,44%
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	0 persen	0 %	1.746.610.000	163.299.829	9,35%
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	0 perseribu	0 %	899.576.000	70.900.232	7,88%
15.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	0 laporan	0 %	486.456.000	0	0,00%
15.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	0 laporan	0 %	96.800.000	19.360.000	20,00%
15.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	48 laporan	0 laporan	0 %	83.120.000	16.624.000	20,00%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
15.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	1 dokumen	0 %	109.300.000	10.086.232	9,23%
15.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	0 organisasi	0 %	123.900.000	24.830.000	20,04%
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	0 persen	0 %	847.034.000	92.399.597	10,91%
16.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	3 laporan	25 %	78.500.000	0	0,00%
16.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	0 orang	0 %	517.624.000	42.867.000	8,28%
16.3	Dukungan Operasional Pelayanan KB	Jumlah Laporan Dukungan Operasional	1 laporan	0 laporan	0 %	250.910.000	49.532.597	19,74%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	Bergerak	Pelayanan KB Bergerak						
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	13 persen	3.53 persen	368.51 %	1.617.120.000	14.042.382	0,87%
17.	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	0 persen	0 %	1.617.120.000	14.042.382	0,87%
17.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	0 organisasi	0 %	130.320.000	14.042.382	10,78%
17.2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	0 laporan	0 %	708.000.000	0	0,00%
17.3	Pendampingan Keluarga Berisiko	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	10 laporan	0 laporan	0 %	778.800.000	0	0,00%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator			Pagu Anggaran		
			Target	Capaian	Persentase	Target	Capaian	Persentase
	Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan						

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan kuat yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin kritisnya pemikiran masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan, disamping adanya pengaruh globalisasi. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah untuk selalu tanggap atas tuntutan masyarakat dan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja atas evaluasi Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dapat kami sajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Kegiatan karnaval kostum belum dilaksanakan dikarenakan menunggu jadwal pelaksanaan oleh tim Kota;

- b. Percepatan pengadaan untuk peralatan kantor;
2. Program Pemberdayaan Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
- a. Rekening belanja Hibah ke Lembaga Karang Taruna dan LKKS dialihkan ke rincian rekening Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat ;
 - b. Pengadaan Mesin jahit sudah dalam proses pelimpahan pengadaan ke system *e-catalog*.
3. Program Rehabilitasi Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
- a. Penyesuaian penerima bantuan sosial untuk Lansia, disabilitas, veteran dan pejuang 3 oktober telah melaksanakan verifikasi dan validasi sehingga pelaksanaannya bisa dilaksanakan di semester II.
 - b. Tidak ada kendala pada verifikasi dan validasi untuk penerima bansos barang kepada yayasan.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
- a. Pelaksanaan Verval belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II;
 - b. Pembagian bansos DBHCHT sudah dilaksanakan untuk tahap pertama;
5. Program Penanganan Bencana secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
- a. Pelaksanaan penanganan bencana baik memberikan pelayanan, penyediaan makanan, dan dukungan psikososial sudah dilaksanakan dengan baik,

sedangkan pendataan kelompok rentan terdapat kendala dalam pelaksanaan lapangannya;

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Pekerjaan pemeliharaan TMP sudah dilaksanakan dengan baik, dan diperlukan pemeliharaan pada jaringan kelistrikan yang sudah perlu dilakukan perbaikan;
7. Program Pengendalian Penduduk secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga belum tersedia data dikarenakan Belum dilakukan pendataan, pelaksanaan menunggu pusat;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun belum tersedia data dikarenakan Pelaksanaan di Triwulan IV;
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) secara umum beberapa target indikator sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Begitu juga dengan serapan anggaran di masing masing sub kegiatan namun demikian ada beberapa yang perlu menjadi catatan, yaitu :
 - a. Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun belum tersedia data dikarenakan Pelaksanaan di Triwulan IV

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program, kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja Perubahan tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Pada prinsipnya program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan tahun 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan secara rinci kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan RENJA 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	3.731.735.000
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	24.270.000
1.06.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.140.000
1.06.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.830.000
1.06.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.300.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.609.250.000
1.06.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	2.567.467.000
1.06.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	39.300.000
1.06.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.483.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat	100 persen	5.000.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
		daerah		
1.06.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000.000
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	279.886.000
1.06.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.300.000
1.06.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	113.004.000
1.06.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4.110.000
1.06.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	88.918.000
1.06.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	5.480.000
1.06.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.000.000
1.06.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	60.074.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	349.422.000
1.06.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.760.000
1.06.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	165.340.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	182.322.000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	463.907.000
1.06.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 unit	229.157.000
1.06.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	202.500.000
1.06.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	32.250.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	381.396.000
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	177.748.000
1.06.02.2.01.000 2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Keluarga	177.748.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	203.648.000
1.06.02.2.03.000 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	41.240.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1.06.02.2.03.000 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	100.968.000
1.06.02.2.03.000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	61.440.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.729.610.000
1.06.04.2.01 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.167.222.000
1.06.04.2.01.000 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	494.556.000
1.06.04.2.01.000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	638.176.000
1.06.04.2.01.000 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	65 orang	34.490.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.82 persen	562.388.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
	Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
1.06.04.2.02.000 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	923 orang	427.060.000
1.06.04.2.02.000 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	22.490.000
1.06.04.2.02.000 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	12.260.000
1.06.04.2.02.000 9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.550.000
1.06.04.2.02.001 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	50.028.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53.73 persen	1.385.700.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	1.385.700.000
1.06.05.2.02.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	16000 orang	534.210.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
1	Kabupaten/Kota	Didata		
1.06.05.2.02.000 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 keluarga	851.490.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	345.092.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	345.092.000
1.06.06.2.01.000 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	289.882.000
1.06.06.2.01.000 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	42.000.000
1.06.06.2.01.000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	13.210.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	103.054.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	103.054.000
1.06.07.2.01.000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	103.054.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	205.380.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	205.380.000
2.14.02.2.02.001 1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	54.480.000
2.14.02.2.02.001 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	122.100.000
2.14.02.2.02.001 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	28.800.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	1.742.610.000
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	899.576.000
2.14.03.2.01.000 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	486.456.000
2.14.03.2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	96.800.000
2.14.03.2.01.001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	40 laporan	83.120.000
2.14.03.2.01.001	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	1 dokumen	109.300.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
2	Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
2.14.03.2.01.001 4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	123.900.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	843.034.000
2.14.03.2.03.000 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	78.500.000
2.14.03.2.03.000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1137 orang	517.624.000
2.14.03.2.03.001 1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	246.910.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	13 persen	1.614.420.000
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.614.420.000

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator	Pagu Anggaran
			Target	Target
	Kesejahteraan Keluarga			
2.14.04.2.02.000 1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	127.620.000
2.14.04.2.02.000 5	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	708.000.000
2.14.04.2.02.000 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	778.800.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja OPD yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Serta menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan TA 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinsos P2KB. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan keterbatasan sumber dana yang ada sehingga dalam pencapaian tujuan untuk support terhadap peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan penanganan kemiskinan serta penurunan angka total fertility rate (angka kelahiran total) belum bisa optimal tercapai.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Substansi Perubahan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kota Pekalongan tahun 2025.
- b. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.
- c. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Perubahan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) DINSOSP2KB Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINSOSP2KB. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DINSOSP2KB Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Perubahan Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007